



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/207/RB.06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Wali Kota Jambi**
di

Jambi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 adalah 60,80 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,12
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,15
	III. Reform	30,00	11,65
	Total Komponen Pengungkit	60,00	29,92
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,55
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,08
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,75
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,50
	Total Komponen Hasil	40,00	30,88
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	60,80

2. Berikut hasil antara dari masing-masing *leading sector* yang telah diterima oleh kementerian PANRB:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Profesionalitas ASN	0-100	65 (rendah)	Badan Kepegawaian Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	10 (kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	88,54 (memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia
4.	Maturitas SPIP	0-5	3 (terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Kapabilitas APIP	0-5	3 (<i>integrated</i>)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan	0-100	85,22 (zona hijau)	Ombudsman Republik Indonesia

3. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Jambi, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.
4. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:
- Pembangunan Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD masih cenderung bersifat formalitas, belum sepenuhnya berfokus kepada tercapainya sasaran reformasi birokrasi itu sendiri. Sehingga dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan secara signifikan;
 - Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum diarahkan untuk melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
 - Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi berdasar Surat Edaran Menteri PANRB nomor 382 s.d 393 tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, implementasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh.
 - Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan evaluasinya belum menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja. Selain itu, penerapan e-government masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan pada layanan;

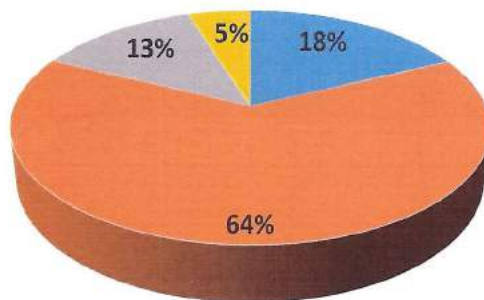
- e. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum dilakukan secara menyeluruh, selain itu belum dilakukan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan. Demikian juga proses *Assessment* belum tuntas dilaksanakan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
 - f. Dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan SAKIP, masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
 - g. Secara formal kebijakan pengawasan seperti membangun SPIP, Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat sudah ada, namun implementasinya masih bersifat formalitas sehingga proses pengawasan belum dapat efektif mengawal tercapainya Tujuan/ Sasaran Pemerintah Daerah dan OPD; dan
 - h. Upaya pelayanan publik yang diberikan cenderung masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal. Terdapat upaya lomba inovasi pelayanan, namun belum seluruhnya memberikan hasil dalam pemberian pelayanan prima.
5. Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 65,02 dengan kategori B (Baik) tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD tahun 2019;
 - b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kota Jambi menunjukkan hasil:

No.	Hasil Survei	Indeks		Rata-rata Nasional
		2019	2020	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,31	3,23	3,37
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,35	3,50	3,50

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,23 dari skala 4. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain itu, hasil survei persepsi pelayanan juga mengalami sedikit penurunan dari angka tahun lalu. Penurunan hasil survei ini mengindikasikan adanya penurunan persepsi *stakeholders* terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
- 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan indeks 3,50 dari skala 4, sama dengan angka rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,35 maka terdapat sedikit peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan yang baik, namun masih perlu ditingkatkan.

- c. Hasil survei internal organisasi terhadap responden pegawai Pemerintah Kota Jambi menunjukkan **indeks 3,25** (skala 5), dengan rincian sebagai berikut:



Hanya terdapat 18% responden yang memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 64% responden baru sebatas memahami kinerja dan indikator kinerja atau kontribusinya terhadap organisasi; sebanyak 13% responden hanya memahami kinerja individunya saja, dan

masih terdapat 5% responden yang sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, serta tidak memahami kontribusi kerjanya terhadap kinerja organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Menggerakkan pihak terkait RB seperti unsur Pimpinan, Tim Internal Reformasi Birokrasi dan Tim Assessor RB, lebih efektif melaksanakan tugasnya dalam merumuskan perencanaan RB yang baik sehingga pemilihan program dan kegiatan RB dapat berkontribusi langsung kepada sasaran RB, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi, target-target RB yang sudah dicanangkan agar dapat tercapai dan dapat mengantisipasi jika terjadi penyimpangan;
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
3. Mempercepat proses penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB nomor 382 s.d 393 tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019;
4. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;

6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
7. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan Manajemen Risiko, sehingga dapat mengendalikan dan melaksanakan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat secara baik, yang akhirnya akan tercipta Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berintegritas; dan
8. Mereviu implementasi pelayanan yang telah dilakukan selama ini untuk mengetahui apakah pelayanan prima telah tercapai sehingga masyarakat merasa puas menerima pelayanan..

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Kami menghargai upaya Wali Kota Jambi beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,




Agus Uji Hantara

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Ketua Tim Independen;
5. Ketua Tim *Quality Assurance*.